

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan pada penelitian yang telah dilakukan bahwa kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Gini Rasio, dan Konsumsi optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Timur. Beberapa klaster Kabupaten/Kota dengan kondisi kausal optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Timur ditemukan di wilayah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan. Klaster dengan hasil UMK optimal tersebut menunjukkan kombinasi kondisi kausal yang optimal untuk memberikan sumbangsih dalam mendukung pencapaian UMK yang optimal. Kondisi kausal yang optimal ini didorong dengan kebijakan dan program pemerintah yang relevan, antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dikarenakan adanya program akselerasi pendidikan seperti kejar paket A, B, dan C yang maksimal untuk membantu menekan angka putus sekolah. Kemudian adanya penyediaan fasilitas pendidikan hingga ke daerah terpencil seperti pembangunan sekolah serta mengadakan beasiswa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK dan MA, dan mahasiswa S1 dan S2 bahkan khusus hafiz Quran guna mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta kemudahan akses pendidikan formal dan nonformal. Pada sisi kesehatan dapat diprioritaskannya program kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting, dan fasilitas kesehatan modern seperti Puskesmas Rawat Inap Standar seperti di Kota Surabaya. Kemudian Pondok Kesehatan Desa seperti di Kabupaten

Sidoarjo untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup dan program asuransi BPJS seperti di Kota Probolinggo yang merata

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dikarenakan mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan industri lokal. Kemudian mengadakan program seperti Megpreneur (Megilan Entrepreneur) untuk mendorong kewirausahaan dengan legalisasi usaha, penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha berbasis kewirausahaan, dan program seperti Young Entrepreneur Success (YES) untuk mendorong inisiatif kewirausahaan yang kemudian meningkatkan TPAK dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Gini Rasio optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dikarenakan mengadakan program redistribusi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum di wilayah pedesaan, pengembangan kawasan industri untuk menarik investor, dan BLT DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dalam membantu menekan ketimpangan pendapatan dengan memberikan bantuan kepada buruh pabrik rokok.
4. Konsumsi optimal dalam mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dikarenakan melakukan Edukasi gizi masyarakat agar meningkatkan pola makan sehat dan berimbang. Kemudian menjalankan Program Provinsi Jawa Timur yaitu Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan maksimal untuk meningkatkan pola konsumsi dan mengadakan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Kemudian upaya penyediaan varietas tanaman tahan kekeringan juga perlu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan melalui kerja sama dengan BMKG.

5.2 Saran

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti kondisi kausal lain agar dapat menjelaskan mengenai indikasi kondisi kausal lain dan

menggali penjelasan yang lebih luas terhadap kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

- b. Metode analisis *crisp-set* QCA dapat diterapkan pada penelitian berikutnya untuk menganalisis kondisi kausal yang optimal dalam mendukung *outcome* di berbagai wilayah.

2. Aspek Praktis

Dalam penelitian ini kondisi IPM, TPAK, Gini Rasio, dan Konsumsi memiliki nilai optimal dalam mendukung *outcome* yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kondisi ini menggambarkan bahwa wilayah yang optimal berada pada Klaster Kabupaten Lumajang, Klaster Kabupaten Sumenep, Klaster Kabupaten Kediri, Klaster Kabupaten Probolinggo, Klaster Kabupaten Malang, Klaster Kabupaten Sidoarjo, Klaster Kabupaten Gresik, Klaster Kota Malang, Klaster Kota Probolinggo, Klaster Kota Surabaya, Klaster Kabupaten Nganjuk, Klaster Kabupaten Ngawi, Klaster Kota Madiun, Klaster Kabupaten Bojonegoro, dan Klaster Kabupaten Lamongan. Hal ini menandakan bahwa kondisi IPM, TPAK, Gini Rasio, dan Konsumsi dalam klaster tersebut berkontribusi dalam mendukung peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Klaster-Klaster tersebut. Adapun saran dan masukan agar UMK pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur meningkat. Pemerintah Daerah diharapkan secara berkala dan menyeluruh untuk mengevaluasi target dan kebijakan pembangunan yang dijalankan dengan melibatkan kerjasama seluruh pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Sehingga program-program strategis dalam meningkatkan angka IPM, TPAK, Gini Rasio, dan Konsumsi dapat dirumuskan dan dilakukan dengan optimal dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang semakin baik dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.